

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Model-model Evaluasi Program

a. Goal oriented evaluation model

Model ini dikembangkan oleh Tyler dan merupakan model yang muncul paling awal. Obyek model ini adalah tujuan program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Tyler mendefinisikan evaluasi sebagai perbandingan antara hasil yang dikehendaki dengan hasil yang sebenarnya. Langkah pertama model yaitu mengenali tujuan suatu program, kemudian indikator-indikator pencapaian tujuan dan alat pengukuran diketahui pasti.²⁷

b. Goal Free Evaluation Model

Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven. Pada pelaksanaan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam evaluasi program pada model ini adalah proses berjalannya program dengan cara mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi pada hal-hal yang positif (hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (hal yang tidak diharapkan). Model evaluasi ini lebih

²⁷ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Cet ke-5. Jakarta: Bumi Aksara. h. 41

menekankan dalam mempertimbangkan tujuan umum, bukan pada tujuan pada komponen-komponen kecil.²⁸

c. *Formatif summatif evaluation model*

Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven. Model evaluasi ini memfokuskan pada tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (evaluasi sumatif). Evaluasi formatif dilaksanakan ketika program masih berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung dan sekaligus mengidentifikasi hambatanya. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir dengan tujuan untuk mengukur ketercapaian program.²⁹

d. *CoAntenance Evaluation Model*

Model ini dikembangkan oleh Stake yang menekankan pada pelaksanaan dua hal pokok yaitu deskripsi (*description*) dan pertimbangan (*judgments*). Model ini membedakan tiga tahap dalam evaluasi program yaitu *anteseden* yang diartikan sebagai konteks, transaksi yang diartikan sebagai proses dan *outcome* yang diartikan sebagai hasil. Tiga hal tersebut dituliskan di antara dua matrik untuk

²⁸ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi ...* h. 41

²⁹ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi ...* h. 42

menunjukkan objek atau sasaran evaluasi yang selanjutnya digambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan.³⁰

Matriks pertama yaitu deskripsi yang berkaitan atau menyangkut maksud tujuan yang diharapkan oleh program dan pengamatan. akibat atau apa yang terjadi atau apa yang sesungguhnya betul-betul terjadi, selanjutnya evaluator mengikuti. Matriks kedua yaitu langkah pertimbangan yang mengacu pada standar, yang telah ditentukan. Kedua matrik tersebut untuk melihat perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, dan untuk menilai manfaat program.

e. *Responsive Evaluation Model*

Pendekatan model ini adalah sistem yang menyempitkan beberapa fakta dalam evaluasi dengan tujuan meningkatkan penggunaan hasil evaluasi kepada individu atau program yang dilaksanakan. Model ini berdasarkan pada sesuatu yang biasa individu lakukan untuk menilai suatu permasalahan. Evaluasi ini dilaksanakan oleh evaluator, yang harus bisa memastikan individu yang dipilih memahami apa yang perlu dilakukan. Evaluator juga harus membuat prosedur baku dan membentuk tim yang bertugas memperhatikan pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya evaluator akan menyediakan catatan, deskripsi, hasil tujuan serta membuat grafik.³¹

f. *Center for the Study of Evaluation (CSE) - University of California in Los Angeles (UCLA) Evaluation Model*

³⁰ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi ...* h. 43

³¹ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi ...* h. 44

CSE-UCLA dikembangkan oleh Alkin. Ciri dari model ini adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Model CSE-UCLA dijalankan menjadi empat tahap, yaitu: *Needs Assessment*, yaitu evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. *Program Planning* yaitu evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan program dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap kesatu. *Formative Evaluation* yaitu evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. *Summative Evaluation* yaitu evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program.³²

g. *Context Evaluation input evaluation (CIPP) Evaluation Model*

Model ini terdiri empat tahapan, yaitu *context evaluation* (evaluasi konteks), *input evaluation* (evaluasi masukan), *process evaluation* (evaluasi proses) dan *product evaluation* (evaluasi terhadap hasil). Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: karakteristik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri.

Evaluasi konteks yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan

³² Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi ...* h. 45

dikembangkan dalam program yang bersangkutan. Evaluasi masukan (*input*) yaitu evaluasi masukan yang tujuan utamanya adalah untuk mengaitkan tujuan, konteks, input, proses dengan hasil program. Evaluasi ini dibuat untuk memperbaiki program. Evaluasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang dapat diambil, rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan menentukan prosedur kerja untuk mencapainya.

Evaluasi proses yaitu diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada "apa" (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, "siapa" (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, "kapan" (*when*) kegiatan akan selesai.³³

h. *Discrepancy Model*

Model ini dikembangkan oleh Provus yang mendefinisikan evaluasi sebagai alat untuk membuat pertimbangan terhadap kekurangan dan kelebihan program antara standar dan kinerja yang diperoleh. Model ini menggunakan pendekatan formatif dan berorientasi pada analisis sistem untuk mendeskripsikan hal-hal yang sesungguhnya terjadi.³⁴

Model Evaluasi *Discrepancy* adalah model evaluasi program yang menekankan pentingnya pemahaman sistem sebelum

³³ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi ...* h. 45-46

³⁴ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi ...* h. 48

dilaksanakan evaluasi. Model ini untuk mengidentifikasi kelemahan dan melaksanakan prosedur *problem solving* (pemecahan masalah) untuk melakukan perbaikan program. Model ini, melakukan evaluasi pada proses langkah-langkah dan indikator pencapaian untuk melihat ketercapaian program dengan standar yang telah ditetapkan, sekaligus pada waktu yang sama mengidentifikasi perbaikan tujuan untuk pengembangan di masa datang.

Langkah-langkah pengembangan dalam model ini yaitu integrasi pada masing-masing komponennya, yang meliputi: *Definition stage* (tahap definisi), *Installation stage* (langkah instalasi), *Product stage* (tahap proses), evaluasi ditandai dengan pengumpulan data untuk menjaga keterlaksanaan program. *Product stage* (tahap produk), pengumpulan data dan analisa yang membantu ke arah penentuan tingkat capaian sasaran dari *outcome*.

2. Evaluasi Program Kemitraan

Evaluasi merupakan kata serapan bahasa inggris *evaluation* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Istilah evaluasi sapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian

(*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan.³⁵

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa evaluasi sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi suatu kebijakan yang berlangsung berkesinambungan dan yang terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.³⁶

Sukardi, M.S menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses menentukan kondisi, pada suatu tujuan telah dicapai. Evaluasi memiliki karakteristik yaitu evaluasi berimplikasi tidak langsung, bersifat tidak lengkap dan memiliki kebermaknaan relative. Oleh karenanya evaluasi harus melalui proses yang diukur dengan instrument, dilaksanakan dengan sistematis dan berkelanjutan agar evaluasi dapat menggambarkan kondisi dan hasil yang dicapai.³⁷

Evaluasi program adalah penilaian sistematis dan yang dilaksanakan dengan objektif pada program atau kebijakan yang sedang berjalan atau program yang telah dilaksanakan, yang meliputi desain atau

³⁵ Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 3

³⁶ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Cet ke-5. Jakarta: Bumi Aksara. h. 2

³⁷ Sukardi, H.M. ,M.S. 2015. *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasioanalnya*. Cet.8. Jakarta: Bumi Aksara. h. 1-2

perencanaan, pelaksanaan dan hasilnya. Tujuan evaluasi program yaitu menentukan relevansi dan ketercapaian tujuan, efisiensi, efektifitas, dampak dan berkelanjutannya. Evaluasi program dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan suatu objek yang dilakukan secara terencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan informasi valid yang digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak terkait.³⁸

Menurut Suharsimi Arikunto dasar kegiatan evaluasi program adalah keingintahuan untuk melihat apakah tujuan program sudah tercapai atau belum. Apabila tujuan program tercapai, bagaimanakah kualitas pencapaian program tersebut? dan apabila tercapai, masih adakah bagian yang belum tercapai dan apa penyebabnya.³⁹

Berdasarkan paparan di atas, evaluasi adalah upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa fakta, data dan informasi, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk menilai suatu program dan memutuskan apakah program tersebut dapat diteruskan atau masih perlu diperbaiki lagi.

Evaluasi program dalam penelitian ini untuk mengevaluasi program *sister school* (kemitraan sekolah dengan sekolah luar negeri) SD Muhammadiyah Bodon terhadap upaya peningkatan mutu pembelajaran dan mutu tenaga pendidik. Evaluasi yang dilakukan mencakup aspek perencanaan, proses pelaksanaan dan capaian tujuan program. Sehingga

³⁸ Musa, Subari. 2005. *Evaluasi Program Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Y-Pin Indonesia. h 21

³⁹ Arikunto, Suharsimi. 1991. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. h 36

dapat diketahui ketercapaian program, signifikansi dan dampak yang diperoleh dari program tersebut.

Macam evaluasi program diantaranya *goal oriented evaluation model*, *goal free evaluation model*, *formatif summatif evaluation model*, *CoAntenance evaluation model*, *responsif evaluation model*, *CIPP evaluation model (context input process product)*, *discrepancy model*. Dalam konteks umum, evaluasi dibedakan atas evaluasi formatif dan evaluasi sumatif dengan pengertian sebagai berikut:⁴⁰

a. Evaluasi formatif

Evaluasi formatif dilakukan pada saat implementasi program berjalan dan bertujuan pada peningkatan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang telah diperoleh. Pada kebanyakan program, evaluasi ini lebih substansial diarahkan pada terjadinya perubahan antara desain program dan implementasi, validasi atau penilaian awal terhadap relevansi efektifitas dan efisiensi. Evaluasi ini juga bermanfaat untuk menilai adanya tanda-tanda kegagalan dan keberhasilan suatu pelaksanaan program. Evaluasi program ini dilakukan untuk mengidentifikasi antara teori atau rancangan program dengan implementasi yang sedang berjalan untuk mengetahui keunggulan maupun kelemahnya supaya terus ada tindakan

⁴⁰ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi Program ...* h. 42

b. Evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi program selesai. Tujuan utamanya adalah untuk menilai keberhasilan suatu program, dari sisi desain, manajemen, efektifitas, output dampak. Temuan-temuan bisa digunakan untuk pembelajaran dalam perencanaan dan implementasi program lainya yang sejenis⁴¹

Dari dua jenis evaluasi yang telah dipaparkan di atas, pada penelitian ini yang paling relevan yaitu evaluasi formatif, karena tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana desain program yang telah dirancangan terhadap implementasi, efektifitas dan efisiensi dalam program sister school SD Muhammadiyah Bodon dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran dan tenaga pendidik.

Secara etimologis kerjasama atau kemitraan memiliki beberapa arti, kemitraan diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.⁴² Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmojo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.⁴³

⁴¹ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi Program* h. 42

⁴² Sulistyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. h. 129

⁴³ Notoatmojo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan* h.106

Kemitraan pendidikan adalah suatu kerjasama yang terjalin antar lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal dengan non formal, lembaga pendidikan dengan masyarakat, atau lembaga pendidikan dengan pihak swasta. Kemitraan pendidikan yang terjalin disuatu lembaga pendidikan memiliki landasan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2007:

- 1) Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.
- 2) Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah.
- 3) Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan TK/RA atau SMP/ MTs.
- 4) Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

Teguh Sulistyani, menjelaskan beberapa model kemitraan sebagai berikut: *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu yaitu persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling

memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih , sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan yaitu kemampuan dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing dan memberikan kebebasan kepada masing-masing mitranya selama unit kerja tidak dirugikan.

Secara spesifik Tony Lendrum, mengemukakan tentang sembilan kata kunci yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan strategis suatu kemitraan, yakni : *Cooperative development, Succesful, Long-term, Strategic, Mutual Trust, World class/best practice, Sustainable Competitive advantage, Mutual benefit for all the partners dan Separate and positive impact.*⁴⁴

3. Pembelajaran

Secara umum mutu diartikan sebagai tingkat atau derajat keunggulan suatu produk hasil kerja baik berupa barang atau jasa. Mutu memiliki beragam pengertian dan makna yang berbeda pada setiap sesuatu, tergantung pada apa yang dihasilkan, dipakai dan penilaian orang. Beberapa definisi mutu menurut para ahli yang disampaikan Nur Zazin dalam bukunya gerakan menata mutu pendidikan sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Rukmana, Nana. 2006. *Strategic Partnering For Educational Management* (Model Manajemen Berbasis Kemitraan). Bandung: Alfabeta. h. 72-73

⁴⁵ Zazin, Nur. 2016. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*. Cet: 3. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. h. 54 - 55

- a. Menurut Gaspers, pengertian mutu dibedakan menjadi 2 yaitu konvensional dan modern. Pengertian secara konvensional diartikan sebagai karakter langsung suatu produk, sedangkan pengertian modern yaitu segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan.
- b. Menurut Arcaro, pengertian mutu adalah tingkat variasi yang memiliki standar dan memiliki ketergantungan pada biaya yang rendah serta usaha pemecahan masalah dalam upaya penyempurnaan yang berkelanjutan.
- c. Menurut Juran, pengertian mutu diartikan sebagai kesesuaian penggunaan atau tepat pakai, yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan proses yang terus menerus, perbaikan yang berkelanjutan, memerlukan kepemimpinan sebagai administrator dan adanya pelatihan.

Dari beberapa pandangan dan pendapat di atas Nur Zazin menyimpulkan mutu dalam konteks pendidikan adalah sesuatu yang relatif, yang diartikan bukan sebagai atribut produk atau layanan. Lebih jelas lagi bahwa sesuatu disebut bermutu apabila sebuah layanan atau hasil memenuhi spesifikasi yang ada.⁴⁶ Bila merujuk pada spesifikasi pendidikan Indonesia, maka spesifikasi tersebut terdapat dalam standar pendidikan yang termuat dalam undang-undang sisdiknas dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan.

⁴⁶ Zazin, Nur. 2016. *Gerakan Menata* h. 56

Standar mutu pendidikan terdiri dari standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pengelolaan, standar penilaian, standar pembiayaan, standar sarana prasarana, dan standar pendidik serta kependidikan. Masing-masing standar tersebut memiliki indikator-indikator yang berfungsi sebagai penjaminan mutu pendidikan.

Pembelajaran adalah proses interaksi antara sesama peserta didik, guru dengan peserta didik yang direncanakan dan dilaksanakan oleh guru secara terprogram dalam disain instruksional dengan menggunakan alat, sarana serta sumber belajar. Tujuan pembelajaran adalah menciptakan perubahan secara terus-menerus dalam pemikiran, sikap dan perilaku siswa. Kegiatan pembelajaran sering dan populer disebut dengan kegiatan belajar mengajar (KBM). Belajar menurut adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan tingkah laku mencakup aspek-aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) serta nilai dan sikap (afektif).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.”

Berdasarkan hal tersebut Guru pada satuan pendidikan atau sekolah harus melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas untuk mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Sedangkan Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh/ *holistik*.⁴⁷

Oemar Hamalik dalam bukunya yang berjudul proses belajar mengajar menyampaikan pandangan dan pendapatnya dengan memisahkan serta membedakan antara mengajar dan belajar, meskipun ia menyatakan bahwa keduanya saling berkaitan erat. Terdapat 4 hal yang menonjol dalam mengajar yaitu:

- a. Mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik di sekolah.
- b. Mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan di sekolah.
- c. Mengajar adalah mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik.
- d. Mengajar adalah memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik.

⁴⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah

- e. Mengajar adalah mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- f. Mengajar adalah suatu proses membantu peserta didik menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴⁸

Kegiatan pembelajaran harus dilakukan sebagai aktifitas dengan penuh kesadaran dan dengan kehati-hatian. Pembelajaran merupakan hasil dari keputusan seorang guru yang harus didasari pertimbangan mulai dari perencanaan pembelajaran, metode dan strategi yang digunakan, serta instrument evaluasi yang diterapkan.⁴⁹

4. Kompetensi Guru/ Pendidik

Pendidik adalah tenaga profesional yang memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan sedangkan Pendidik pada perguruan tinggi memiliki tugas tambahan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.⁵⁰ Pendapat Ruqayah dan Atik Sismati bahwa tenaga pendidik adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.⁵¹ Pandangan berbeda disampaikan oleh Syarifudin dan M. Basyiruudin menyebutkan pengertian guru adalah tenaga professional yang dapat menjadikan

⁴⁸ Hamalik, Oemar. 2005. *Proses Belajar Mengajar*. cet: 4. Jakarta: Bumi Aksara. h. 44 - 52

⁴⁹ Cruickshank, Donald R., dkk. 2014. *Perilaku Mengajar*. edisi 6 buku 2. Terj: Gisella Tani Pratiwi. Jakarta: Salemba Humanika. h. 1

⁵⁰ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) Nomor .20 tahun 2003, pasal 39 ayat 2

⁵¹ Rugayah dan Atiek Sismiati. 2011. *Profesi Kependidikan* . Bandung : Ghalia Indonesia. h.

murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi.⁵²

Tenaga kependidikan dalam hal ini pendidik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, serta memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁵³

Tugas Pendidik yang dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah;

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakangkeluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

⁵² Nurdin, Syarifuddin dan M Basyiruddin Usman. 2003. *Guru Profesional Implementasi dan Kurikulum*. Jakarta : Ciputat Press. h. 8

⁵³ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) Nomor .20 tahun 2003 ,bab 1 pasal 1

d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Melihat tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk pendidik jelas bahwa tujuan utama dari pelaksanaan tugas adalah terjadinya suatu proses pembelajaran yang berhasil. Segala aktifitas yang dilakukan oleh para pendidik harus mengarah pada keberhasilan pembelajaran yang dialami oleh para peserta didiknya. Disamping itu pendidik harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan melibatkan berbagai komponen yang terlibat dalamnya serta melaksanakan evaluasi pembelajaran.

Tenaga pendidik harus mempunyai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi social yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁵⁴ Untuk menjamin mutu pendidik keempat kompetensi tersebut harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan, karena dunia pendidikan selalu berkembang dan mengalami perubahan yang dinamis. Dengan adanya upaya peningkatan kemampuan oleh guru diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud.

Mutu tenaga pendidik mengacu pada masukan, proses, keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi:

a. Kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa.

⁵⁴ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor. 20 tahun 2003, pasal 10 ayat 1

- b. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah.
- c. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak, seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi.
- d. Mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita.⁵⁵

Menurut Dedi Supriadi dan Trianto, untuk menjadi guru profesional, guru dituntut memiliki lima kemampuan (*skill*) yaitu:

- a. Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya.
- b. Menguasai secara mendalam materi pelajaran yang akan diajarkan.
- c. Cara mengajar menggunakan metode yang sesuai dengan mata pelajaran.
- d. Bertanggung jawab dan memantau hasil belajar peserta didik.
- e. Mampu berfikir sistematis, kritis, taktis dan strategis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya.
- f. Mereka merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.⁵⁶

Kompetensi Guru meliputi 4 aspek, yaitu pedagogik, kepribadian profesional, dan sosial. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan memahami siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi

⁵⁵ Danim, Sudarwan. 2003. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Cet: 1Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 53

⁵⁶ Usman, Moh. Uzer. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Cet.19. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h. 45 - 46

hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia.

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar. Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.⁵⁷

⁵⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru